

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



MUH JASRI

NIM: 105731107419

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH JASRI

NIM: 105731107419

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis**

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”.

(QS. Al-Baqarah:155-156)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Dengan tulus ikhlas

Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk:

Kedua orang tua yang selalu setia memdampingi, memberi dukungan dan mengorbankan banyak hal untuk aku dapat ampai ke jenjang ini



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Muh. Jasri
NIM : 105731107419
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diuji didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN. 0915058801

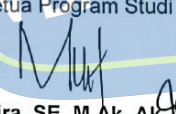

Abd Salam, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN: 0931126607

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Anji Jam'an S.E., M.Si.
NBM: 651 507


Mira, SE.,M.Ak.,Ak.
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muh Jasri, Nim : 105731107419 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharram 1445 H/ 29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Ramly, SE., M.Si
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
4. Ainun Arizah, S.Pd., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



**FAKULTAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Jasri
Stambuk : 105731107419
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muh Jasri
NIM:105731107419

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr. H. Anji Jam'an S.E., M.Si.
NBM: 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE.,M.Ak.,Ak.
NBM: 128 684

**HALAMAN PERNYATAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Jasri
NIM : 105731107419
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muh Jasri
NIM: 105731107419

ABSTRAK

MUH. JASRI. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Ismail Badollahi dan Abd Salam.

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang berdasarkan rasio desentralisasi masuk dalam kategori sangat rendah, rasio ketergantungan yang tinggi, tingkat kemandirian yang sangat rendah, rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi mengalami porsi belanja yang cukup tinggi, rasio keserasian yaitu rasio belanja modal daerah yang masih kecil dan rasio efisiensi yang cukup efisien.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis Rasio, Rasio Desentralisasi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja, Rasio Efisiensi.

ABSTRACT

MUH. JASRI. 2023. Analysis of the Financial Performance of the Local Government of Enrekang Regency. Thesis. Accounting Major. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah Makassar University.

The purpose of this research is a type of quantitative research with the aim of research to find out the Financial Performance of the Regional Government of Enrekang Regency in 2018-2022 based on the ratio of degrees of decentralization, ratio of dependency, ratio of independence, ratio of compatibility (ratio of operating expenditures and capital expenditures ratio) and expenditure efficiency ratio. The analytical method used is financial ratio analysis using data collection techniques, namely documentation and observation techniques. Based on the results of research on the financial performance of the local government of Enrekang district based on the decentralization ratio, it is in the very low category, the dependency ratio is high, the level of independence is very low, the compatibility ratio, namely the operating expenditure ratio, has a fairly high portion of expenditure, the compatibility ratio, namely the ratio of regional capital expenditure still small and the efficiency ratio is quite efficient.

Keywords: Financial Performance, Budget Realization Report, Ratio Analysis, Decentralization Ratio, Harmony Ratio, Independence Ratio, Spending Ratio, Efficiency Ratio.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Pujian yang agung penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan Rahmat, petunjuk dan ridho-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tak lupa pula penulis bershalawat kepada Rasulullah Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita agama keselamatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Bapak Masrullah, SE., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
6. Bapak Abd Salam, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Pembimbing II yang dengan segala kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menungkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Permadi Hasan, SE., M.AP, Selaku kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta staf yang telah memberikan izin penelitian serta memfasilitasi penulis selama melaksanakan penelitian.

9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Jihad dan Muhani yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan serta doa dan dukungan selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Teristima juga kepada Esranti Pakendek, terima kasih atas dukungan, masukan dan waktunya untuk menemani penulis menuangkan pemikiran selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
12. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada para pembaca penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, bagi di penulis sendiri, dan Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Konsep Kinerja	6
2. Laporan Keuangan	7
3. Jenis-Jenis Transaksi Pemerintah Daerah.....	9
4. Standar Akuntansi Pemerintah	10
5. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	12
6. Tujuan Analisis Laporan Keuangan	13
7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
8. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	15
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Defenisi Operasional.....	30
F. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Enrekang.....	34
2. Struktur Organisasi BPKAD Kab. Enrekang.....	35
3. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Enrekang	36
B. Laporan Realisasi Anggaran.....	37
C. Analisis Data	45
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

28



DAFTAR TABEL

2.1	Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah	17
2.2	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	18
2.3	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	18
2.4	Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah	20
2.5	Penelitian Terdahulu	20
4.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018	38
4.2	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019	39
4.3	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020	40
4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2021	42
4.5	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2022	43
4.6	Rasio Derajat Desentralisasi	45
4.7	Rasio Ketergantungan	46
4.8	Rasio Kemandirian	47
4.9	Rasio Belanja Operasi	49
4.10	Rasio Belanja Modal	50
4.11	Rasio Efisiensi Belanja	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban (Rahmayati dkk., 2011).

Menurut Madarsimo (2019) dalam (H. F. Harahap, 2020), salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, kemampuan

keuangan, kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik ekologis. Umumnya sumber keuangan daerah Sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat. Hanya Sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya dalam satu tahun.

APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penggunaan APBD, Pemerintah Daerah Wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah

dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat.

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) : Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Sijabat et al (2013) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian

pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016), menemukan bahwa efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran keuangan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerahnya. Hal tersebut terlihat dari efektifitas keuangan daerah yang termasuk kategori efektif dan efisiensi keuangan daerah yang berada pada kategori sangat efisien.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dimana sama-sama mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi Belanja. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial. Pengembangan potensi wilayah kabupaten Enrekang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pengembangan pembangunan pada Perkebunan dan Pariwisata. Hal tersebut seharusnya menjadikan Kabupaten Enrekang memiliki potensi keuangan yang cukup tinggi.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kab. Enrekang.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasinya
Pemerintah Daerah Kab. Enrekang T.A 2014-2018

Tahun	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
2014	709,220,409,326.00	701,511,734,268.18	98,91%
2015	946,648,050,605.00	919,862,386,647.46	97,17%
2016	1,103,986,718,250.00	1,032,816,629,667.45	93,55%
2017	1,057,719,428,195.00	1,000,853,540,078.55	94,62%
2018	1,088,923,277,552.00	1,014,028,741,574.23	93,12%

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektif anggaran pendapatan pada pemerintah daerah kab. Enrekang pada tahun 2014-2018 dinilai kurang efektif, karena adanya penurunan tingkat capaian setiap tahunnya yaitu sebesar 98,91%, 97,17%, 93,55%, 94,62% dan 93,12%. Tingkat capaian yang paling tinggi tercapai pada T.A 2014 yaitu dengan persentase sebesar 98,91%.

Sebagai salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dituntut untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, penelitian tentang Kinerja keuangan di Kabupaten Enrekang masih jarang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Enrekang periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan studi untuk melatih kemampuan dalam bidang penelitian, dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan
- c. penelitian dengan objek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk lebih meningkatkan kinerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Kinerja

Menurut kamus akuntansi manajemen dalam Susanto (2019) Kinerja (performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2016:67)

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Edison (2016:190), kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutrisno (2016):

Kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang

bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dari seseorang atau suatu kelompok tertentu.

2. Laporan Keuangan

Menurut Rizal (2017) Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Bagi para penganalisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis atau perusahaan. Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk hasil penjualan maupun pendapatan bersih (Supit dkk., 2016).

Menurut Hery (2012), laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Dalam (Zuhri & Soleh) tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP No.1, paragraph 9):

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanpa laporan kinerja, laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan memberikan informasi yang kurang lengkap kepada penggunanya. Pentingnya informasi surplus dan deficit dalam laporan keuangan pemerintah karena pembiayaan penerimaan mencantumkan adanya penerimaan pinjaman. Ancaman serius apabila informasi dari laporan kinerja tidak dapat disajikan oleh entitas akan menjadikan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat.

3. Jenis-Jenis Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari: (a) Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah; (b) Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah; (c) Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus; (d) Aset Daerah, meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.; (e) Kewajiban Daerah, meliputi uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah; (f) Ekuitas Dana Daerah, didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Dedi, dkk 2009:1).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mengatakan bahwa laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (f) Laporan Arus Kas (LAK), dan (g) Catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional mempunyai tujuan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Tujuan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016) dalam Harahap (2020) mengenai definisi analisi laporan keuangan:

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk meninterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Walsh Ciaran (2006:29) menyatakan bahwa “analisis laporan keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan investasi”.

Menurut Harapap dalam (Aprilia Sari & Imam Hidayat, 2022) analisis laporan keuangan adalah:

“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

6. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:68) tujuan analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Untuk mengetahui Langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak sudah dianggap berhasil atau gagal.

6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (b) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dan (c) untuk mewujudkan pertanggung jawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2022:121).

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, menurut mardiasmo (2009:122) secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan Tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;

- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi;
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

8. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak baik. Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Rondowunu dalam (Oktavia et al., 2016) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan dan ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Rizal (2017) :

beberapa alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan, yaitu salah satunya dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan dengan membandingkan antara satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan lainnya dalam periode tertentu yang memiliki hubungan yang relevan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Dalam laporan keuangan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berikut adalah tabel kategori tingkat desentralisasi keuangan daerah

Tabel 2.1

Kategori Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi Keuangan
Sangat rendah	0% - 25%
Rendah	>25% - 50%
Sedang	>50% - 75%
Tinggi (mandiri)	>75% - 100%

Sumber: Poyoh, Murni & Tulung (2017)

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

Tabel 2.2
Kategori Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Ketergantungan
Sangat rendah	0% - 25%
Rendah	>25% - 50%
Sedang	>50% - 75%
Tinggi (ketergantungan)	>75% - 100%

Sumber: Poyoh, Murni & Tulung (2017)

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 2.3
Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Poyoh, Murni & Tulung (2017)

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian:

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

e. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang

dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 2.4
Kategori Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	<60%

Sumber: Poyoh, Murni & Tulung (2017)

Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Heri Faisal Harahap / 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan analisis rasio Keuangan	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan pemerintah pusat masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang di anggarakan.
2.	Amelia Oktrivina D. Siregar dan Ira Mariana S / 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi dan rasio keserasian.	Kinerja keuangan pemerintah kota Depok jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan cukup. Berdasarkan Rasio Kemandirian dapat dikatakan sedang. Berdasarkan rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif. Serta rasio efisiensi dapat dikatakan kurang dan berdasarkan rasio keserasian menunjukkan bahwa

					belanja operasi dan belanja modal belum seimbang.
3.	Listiawati dan Erni Kurniasari / 2020	Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan Metode Camel pada Bank Buku 4	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Analisis Kesehatan Bank	Hasil penelitian perbandingan kinerja keuangan pada Bank Buku 4 jika dilihat dari rasio permodalan (dikategorikan golongan sangat sehat, dilihat dari rasio Kualitas Asset dikategorikan golongan sangat sehat, dilihat dari rasio Manajemen dikategorikan golongan sangat sehat dan dilihat dari rasio likuiditas dikategorikan cukup sehat.
4.	Nizwan Zukhri / 2020	Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan dan Derajat Fiskal	Kinerja Keuangan	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Berdasarkan derajat ketergantungan berada dalam kategori sangat tinggi dan derajat desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang.

5.	Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munadar / 2021	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020	Kinerja Keuangan	Analisis yang digunakan adalah analisis rasio menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian rasio efektifitas serta rasio efisiensi PAD, rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung dan rasio pertumbuhan.	Hasil studi menemukan bahwa derajat desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD relatif kecil, tingkat kemandirian yang kecil, tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, realisasi penerimaan yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Selain itu perbandingan belanja langsung yang lebih besar sehingga tercermin bahwa pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.
6.	Mirza Wijaya Putra, Dedi Darwis dan Adhie Thyo Priandika / 2021	Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah).	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan Rasio Keuangan sebagai Alat analisis	Hasil analisis rasio profitabilitas pada CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah, ditemukan bahwa dengan adanya sistem analisis profitabilitas dapat mengetahui kinerja keuangan karena sistem dapat secara otomatis menghitung perhitung untuk <i>net profit margin</i> , <i>return on equity</i> , <i>gross profit margin</i> , <i>return on sales</i> , pengguna

					dapat mengetahui laporan keuangan agar dapat meminimalisir kerugian perusahaan dalam menjalankan bisnis.
7.	Sri Diana, Sulastiningsih, Endar Sulistyana dan Purwati / 2021	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan Analisis Keuangan Bank yaitu Rasio Profitabilitas/rentabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas dilihat dari sisi BOPO memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan rasio kemampuan bank masing-masing perbankan mengalami penurunan kemampuan likuiditas dan pada sisi solvabilitas menunjukkan bahwa masing-masing bank syariah memiliki kemampuan dan kinerja yang baik.
8.	Dani Melmambesy / 2022	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian, ketergantungan, desentralisasi fiskal dan efektivitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan menunjukkan angka yang sedang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi, rasio desentralisasi fiskal termasuk dalam kategori kurang dan rasio efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif.

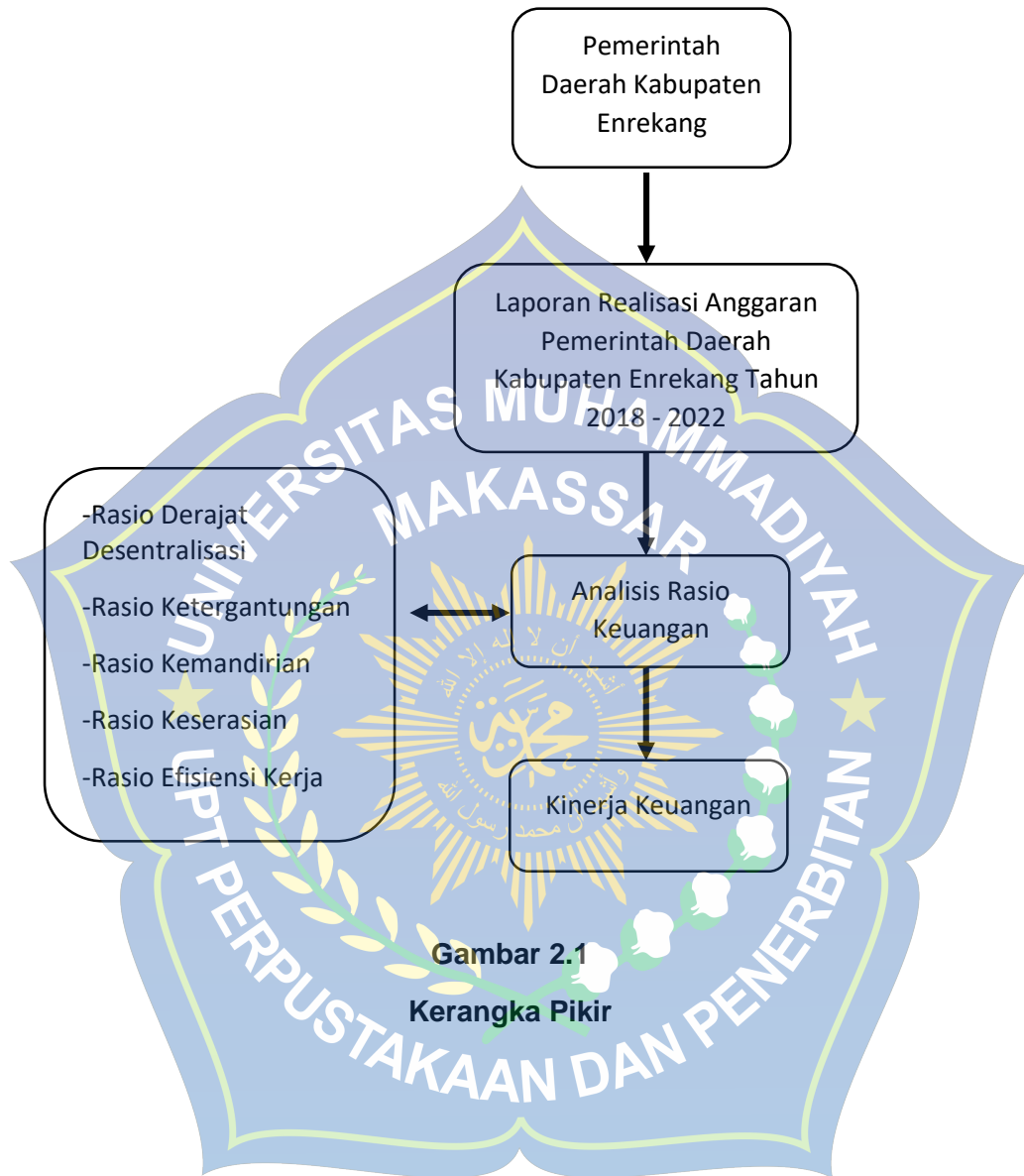
9.	Nenda Marliani / 2022	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022	Kinerja Keuangan	Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif menggunakan analisis rasio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi berada pada kriteria kurang dan rata-rata rasio efektivitas PAD sudah sangat efektif dan rata-rata rasio efisiensi belanja sudah termasuk kategori efisien.
10.	Dwi Estuti dan Teti Anggita Safitri / 2023	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Kinerja Keuangan	Penelitian ini menggunakan analisis Rasio sebagai alat analisisnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Kulon Progo masuk kategori rendah. Realisasi penerimaan PAD termasuk dalam kategori sangat efektif, Derajat desentralisasi menunjukkan kriteria yang rendah. Tingkat ketergantungan pemerintah yang sangat tinggi serta kemandirian yang masih sangat rendah.

C. Kerangka Pikir

Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Dengan adanya teori yang mendukung dalam penelitian ini diharapkan analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kerangka pikir ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Pemeriksa memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif Kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2011).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Enrekang yang beralamatkan di Pinang, Kec. Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan April hingga Mei 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala bahan keterangan atau fakta yang sudah dicatat dan dapat diobservasi. Dengan kata lain data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif

maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefenisikan. Penelitian ini menggunakan data angka laporan keuangan, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan perhitungan formula atau rumus rasio keuangan yang digunakan sesuai tujuan pada penelitian ini (Yulinchton et al., 2022). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan jalan membuat suatu konsep mengenai masalah yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.
2. Dokumentasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan untuk memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti (Widodo, 2017). Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data seperti gambaran umum kabupaten enrekang, visi dan misi laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Enrekang.

E. Defenisi Operasional

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi belanja.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan (Sandy Mokodompit dkk., 2014). Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017 – 2021, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat kinerja keuangan, adapun rumusnya sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan Daerah, dirumuskan sebagai berikut (Saputra et al., 2018):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Makodompit et al., 2014):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat/provinsi atau dari pinjaman. Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut (Saputra et al., 2018):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Jika persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi semakin tinggi, maka persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Hakim, 2020). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (R. M. Yulinchton et al., 2022):

$$\text{a. Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah, rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Susanto, 2019):

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Enrekang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Enrekang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Cikal bakal keberadaan dari BPKAD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan tugas baru yaitu Badan Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah bagian perlengkapan pada sekretariat daerah sehingga dibentuk organisasi perangkat daerah yang baru dan berubah

nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecahkan dan dimekarkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bidang penerimaan DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan bidang Asset dikembalikan menjadi Bagian Aset pada Sekretariat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

2. Struktur Organisasi BPKAD Kab. Enrekang

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Kepala DPKAD
- b. Sekretaris
- c. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Bidang Perencanaan Anggaran

1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran II

3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran III

e. Bidang Perbendaharaan

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

2) Sub Bidang Belanja Operasi

3) Sub Bidang Belanja Modal

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

2) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

3) Sub Bidang Konsolidasi Dan Pelaporan

g. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

2) Sub Bidang Pemanfaatan Pengawasan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

3) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

3. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Enrekang

a. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang Efektif dan Efisien, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabel untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki
- 2) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelola keuangan dan aset daerah dapat berjalan secara Efektif, Efisien, dan Akuntabilitas

B. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas.

Berikut adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2018-2022.

Tabel 4.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Pendapatan	1,089,924,277,552.00	1,014,028,741,584.23	93,03
Pendapatan Asli Daerah	129,616,126,867.00	66,043,333,304.23	50,95
Pendapatan Transfer	926,308,150,685.00	916,237,210,294.00	98,91
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	34,000,000,000.00	31,748,197,986.00	93,37
Belanja	1,086,284,012,289.00	1,006,485,625,084.78	92,65
Belanja Operasi	717,941,985,575.00	690,870,509,277.60	96,22
Belanja Modal	212,301,479,614.00	160,111,439,072.00	75,41
Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	230,399,818.18	30,71
Transfer	155,290,547,100.00	155,273,276,917.00	99,98
Pembiayaan	-2,639,265,263.00	-2,325,472,762.46	88,11
Penerimaan Daerah	7,250,734,737.00	7,164,527,237.54	98,81
Pengeluaran Daerah	9,890,000,000.00	9,490,000,000.00	95,95

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang

Tabel 4.1, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp916.237.210.294,00 lebih rendah dari pada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 66.43.333.304,23, pendapatan transfer sebesar Rp 916.237.210.294,00 dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya) sebesar Rp 31.748.197.986,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.006.485.625.084,00 lebih rendah daripada target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi,

belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 690.870.509.277,60, Belanja modal sebesar Rp 160.111.439.072,00, belanja tak terduga sebesar Rp 230.399.818,18, dan transfer sebesar Rp 155.273.276.917,00.

Jumlah realisasi pembiayaan adalah hasil dari realisasi penerimaan sebesar Rp 7.164.527.237,54 dikurang realisasi pengeluaran sebesar 9.490.000.000,00 maka realisasi pembiayaan sebesar – Rp 2.325.472.762,46. Walaupun realisasi pembiayaan hasilnya minus namun realisasi pembiayaan lebih rendah dari target anggaran.

Tabel 4.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Pendapatan	1,159,314,356,011.00	1,064,637,616,007.58	91,83
Pendapatan Asli Daerah	134,973,760,140.00	73,239,444,538.35	54,26
Pendapatan Transfer	974,594,495,871.00	949,009,843,554.23	97,37
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	49,746,100,000.00	42,388,327,915.00	85,20
Belanja	1,165,226,745,882.00	1,050,617,490,496.42	90,16
Belanja Operasi	760,417,874,923.00	713,251,271,965.42	93,79
Belanja Modal	230,273,065,363.00	163,396,969,835.00	70,95
Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	183,444,100.00	24,45
Transfer	173,785,805,596.00	173,785,804,596.00	99,99
Pembiayaan	5,912,389,871.00	3,121,978,726.99	52,80
Penerimaan Daerah	8,412,389,871.00	5,221,978,726.99	62,07
Pengeluaran Daerah	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00	84,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang

Tabel 4.2, menggambarkan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan tahun 2019. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.064.637.616.007,58, lebih rendah daripada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 73.239.444.538,35, pendapatan transfer sebesar Rp 949.009.843.554,23 dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya) sebesar Rp 42.388.327.915,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.050.617.490.496,42 lebih rendah daripada target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 713.251.271.965,42, belanja modal sebesar Rp 163.396.969.835,00, belanja tak terduga sebesar Rp 183.444.100,00 dan transfer sebesar Rp. 173.785.804.596,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 3.121.978.726,99 lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp 5.221.978.726,99 dan Rp 2.100.000.000,00.

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Pendapatan	1,157,683,880,934.00	1,101,162,425,866.06	95,17
Pendapatan Asli Daerah	118,959,749,845.00	78,247,324,549.96	65,77
Pendapatan Transfer	994,924,131,089.00	984,948,051,316.10	98,99
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	43,800,000,000.00	37,967,050,000.00	86,68
Belanja	1,207,525,985,172.00	1,101,347,120,795.53	91,20
Belanja Operasi	750,838,707,715.00	697,915,103,852.37	92,95
Belanja Modal	270,438,941,099.00	224,033,079,623.80	82,84
Belanja Tidak Terduga	15,300,000,000.00	8,450,600,961.36	55,23
Transfer	170,948,336,358.00	170,948,336,358.00	100
Pembiayaan	49,842,104,238.00	12,142,104,238.15	24,36
Penerimaan Daerah	55,242,104,238.00	17,142,104,238.15	31,03
Pengeluaran Daerah	5,400,000,000.00	5,000,000,000.00	92,59

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang

Tabel 4.3, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2020. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.101.162.425.866,06, lebih rendah daripada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 78.247.324.549,96, pendapatan transfer sebesar Rp 984.948.051.316,10, dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya) sebesar Rp 37.967.050.000,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.101.347.120.795,53 lebih rendah daripada target anggaran, dimana anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 697.915.103.852,37, belanja modal sebesar Rp224.033.079.623,80, belanja tak terduga sebesar Rp 8.450.600.961,36 dan transfer sebesar Rp 170.948.336.358.00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 12.142.104.238,15 lebih rendah dari pada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp 17.142.104.238,15 dan pengeluaran daerah sebesar Rp 5.000.000.000.000,00

Tabel 4.4
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Pendapatan	1,165,356,503,626.00	1,022,823,474,049.08	87,76
Pendapatan Asli Daerah	178,867,670,484.00	73,308,654,593.08	40,98
Pendapatan Transfer	936,397,833,142.00	916,110,206,456.00	97,83
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	50,091,000,000.00	33,404,613,000.00	66,68
Belanja	1,610,913,912,934.00	1,114,651,028,778.10	69,19
Belanja Operasi	765,274,860,293.00	690,392,852,608.10	90,21
Belanja Modal	670,488,335,672.00	252,239,969,483.00	37,62
Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	2,981,313,814.00	99,37
Transfer	172,150,716,969.00	169,036,892,873.00	98,19
Pembiayaan	445,557,409,308.00	115,229,409,308.68	25,86
Penerimaan Daerah	453,557,409,308.00	122,332,409,308.68	26,97
Pengeluaran Daerah	8,000,000,000.00	7,103,000,000.00	88,78

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang

Tabel 4.4, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan tahun 2021. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.022.823.474.049,08, lebih rendah dari pada target anggaran. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 73.308.654.593,08, pendapatan transfer sebesar Rp 916.110.206.456,00, dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya) sebesar Rp 33.404.613.000,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.114.651.028.778,10 lebih rendah daripada target anggaran, anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 690.392.852.608,10, belanja modal sebesar Rp 252.239.969.483,00, belanja tidak terduga sebesar Rp 2.981.313.814,00 dan transfer sebesar Rp 169.036.892.873,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 115.229.049.308,68 lebih rendah dari target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp 122.332.409.308,68, dan pengeluaran daerah sebesar Rp 7.103.000.000,00

Tabel 4.5
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian (%)
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Pendapatan	1,065,557,067,436.00	982,607,686,346.18	92,21
Pendapatan Asli Daerah	176,262,839,970.00	102,285,515,061.18	58,03
Pendapatan Transfer	887,294,227,466.00	880,321,968,985.00	99,21
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2,000,000,000.00	202,300.00	0,01
Belanja	1,415,033,219,500.00	1,262,300,840,319.64	89,21
Belanja Operasi	762,442,758,072.00	702,493,465,660.00	92,13
Belanja Modal	495,333,676,585.00	408,619,149,456.00	82,49
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,227,604,402.64	61,38
Transfer	155,256,784,843.00	149,960,620,801.00	96,58
Pembiayaan	349,476,152,064.00	345,162,065,449.66	98,76
Penerimaan Daerah	354,626,854,579.00	349,527,067,579.66	98,56
Pengeluaran Daerah	5,150,702,515.00	4,365,002,130.00	84,74

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang

Tabel 4.5, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2022. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 982.607.686.346,18, lebih rendah dari target anggaran. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 102.285.515.061,18, pendapatan transfer sebesar Rp 880.321.968.985,00 dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah) sebesar Rp 202.300,00 dimana pendapatan ini lebih sedikit dari periode sebelumnya.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.262.300.840.319,64, lebih rendah daripada target anggaran, anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 702.493.465.660,00, belanja modal sebesar Rp 408.619.149.456,00, belanja tak terduga sebesar Rp 1.227.604.402,64, dan transfer sebesar Rp 149.960.620.801,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 345.162.055.449,66, lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp 349.527.067.579,66 dan pengeluaran daerah sebesar Rp 4.365.002.130,00.

C. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPKAD Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2018-2022. Rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Efisiensi Belanja. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang didapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Enrekang. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Berikut ini adalah hasil analisis rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022:

Tabel 4.6

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kategori
2018	66,043,333,304.23	1,014,024,741,584.23	6,51%	Sangat Rendah
2019	73,239,444,538.35	1,064,637,616,007.58	6,87%	Sangat Rendah
2020	78,247,324,549.96	1,101,162,425,866.06	7,10%	Sangat Rendah
2021	73,308,654,593.08	1,022,823,474,049.08	7,16%	Sangat Rendah
2022	102,285,515,061.18	982,607,686,346.18	10,40%	Sangat Rendah
Rata-Rata	78,624,854,409.36	1,037,051,188,770.63	7,58%	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Olah data penulis

Persentase tingkat derajat desentralisasi terkecil terdapat pada tahun 2018 yaitu 6,51% sedangkan persentase tingkat derajat desentralisasi terbesar terdapat pada tahun 2022 yaitu 10,40%. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, rata-rata derajat desentralisasi yaitu 7,58%. Derajat desentralisasi keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang masuk dalam kategori sangat rendah.

2. Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tingkat kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya diukur menggunakan rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan yang dihasilkan maka ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, begitu pun sebaliknya. Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah.

Berikut ini hasil analisis rasio ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022:

Tabel 4.7

Rasio Ketergantungan Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Kategori
2018	916,237,210,294.00	1,014,024,741,584.23	90,35%	Tinggi
2019	949,009,843,554.23	1,064,637,616,007.58	89,13%	Tinggi
2020	984,948,051,316.10	1,101,162,425,866.06	89,44%	Tinggi
2021	916,110,206,456.00	1,022,823,474,049.08	89,56%	Tinggi
2022	880,321,968,985.00	982,607,686,346.18	89,59%	Tinggi
Rata-Rata	929,325,456,121.07	1,037,051,188,770.63	89,61%	Tinggi

Sumber: Hasil olah data penulis

Persentase tingkat rasio ketergantungan terkecil terdapat pada tahun 2019 yaitu 89,13% sedangkan persentase tingkat rasio ketergantungan terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 90,35%. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, rata-rata rasio ketergantungan yaitu 89,61%. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang masuk dalam kategori tinggi (ketergantungan).

3. Rasio Kemandirian Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Rasio kemandirian adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman.

Adapun hasil analisis rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 4.8:

Tabel 4.8
Rasio Kemandirian Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kategori
2018	66,043,333,304.23	916,237,210,294.00	7,20%	Sangat Rendah
2019	73,239,444,538.35	949,009,843,554.23	7,71%	Sangat Rendah
2020	78,247,324,549.96	984,948,051,316.10	7,94%	Sangat Rendah
2021	73,308,654,593.08	916,110,206,456.00	8%	Sangat Rendah
2022	102,285,515,061.18	880,321,968,985.00	11,61%	Sangat Rendah
Rata-Rata	78,624,854,409.36	929,325,456,121.07	8,46%	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Olah data penulis

Persentase tingkat rasio kemandirian terkecil terdapat pada tahun 2018 yaitu 7,20% sedangkan persentase tingkat rasio kemandirian terbesar terdapat pada tahun 2022 yaitu 11,61%. Apabila terlihat dari tahun 2018-2022, rata-rata rasio kemandirian yaitu 8,46% dengan pola hubungan yaitu pola instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan jauh dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri.

4. Rasio Keserasian Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 sebagai berikut

Rasio keserasian menggambarkan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentas dana yang dialokasikan untuk belanja operasi artinya persentase investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat semakin kecil.

a. Rasio Belanja Operasi

Jika rasio belanja operasi lebih besar daripada rasio belanja modal maka, rasio keserasian belanja modal terhadap belanja daerah rendah. Rasio belanja operasi dihitung dengan membandingkan total Belanja Operasi dengan total Belanja Daerah. Berikut ini hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022:

Tabel 4.9

Rasio Belanja Operasi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja (%)
2018	690,870,509,277.60	850,981,948,349.60	81,19%
2019	713,251,271,965.42	876,648,241,800.42	81,36%
2020	697,915,103,852.37	921,948,183,476.17	75,70%
2021	690,392,852,608.10	942,632,822,091.10	73,24%
2022	702,493,465,660.00	1,111,112,615,116.00	63,22%
Rata-Rata	698,984,640,672.70	940,664,762,166.66	74,30%

Sumber: Hasil Olah data penulis

Persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2021 yaitu 73,24% sedangkan persentase tingkat rasio belanja operasi terhadap total belanja terbesar terdapat pada tahun 2019 sebesar 81,36%. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, dengan rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja yaitu 74,30%.

b. Rasio Belanja Modal

Jika Rasio Belanja Operasi lebih kecil daripada rasio belanja modal, maka rasio keserasian belanja modal terhadap belanja daerah tinggi. Rasio keserasian belanja modal dihitung dengan membandingkan total Belanja Modal dengan total Belanja Daerah. Berikut hasil rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Enrekang tahun 2018-2022:

Tabel 4.10

Rasio Belanja Modal Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal terhadap total belanja (%)
2018	160,111,439,072.00	850,981,948,349.60	18,81%
2019	163,396,969,835.00	876,648,241,800.42	18,64%
2020	224,033,079,623.80	921,948,183,476.17	24,30%
2021	252,239,969,483.00	942,632,822,091.10	26,76%
2022	408,619,149,456.00	1,111,112,615,116.00	36,78%
Rata-Rata	241,680,121,493.96	940,664,762,166.66	25,69%

Sumber: Hasil Olah data Penulis

Persentase tingkat rasio belanja modal terhadap total belanja terkecil terdapat pada tahun 2019 yaitu 18,64%. Rasio ini mengalami penurunan di tahun 2018-2019 dan kembali mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, dengan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 25,69%.

5. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan 100%.

Berikut ini hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018-2022:

Tabel 4.11
Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Enrekang 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja(Rp)	Rasio Efisiensi belanja (%)	Kategori
2018	850,981,948,349.60	930,243,465,189.00	91,47%	Kurang efisien
2019	876,648,241,800.42	990,690,940,286.00	88,48%	Cukup efisien
2020	921,948,183,476.17	1,021,277,648,814.00	90,27%	Kurang efisien
2021	942,632,822,091.10	1,435,763,195,965.00	65,65%	efisien
2022	1,111,112,615,116.00	1,257,776,434,657.00	88,33%	Cukup efisien
Rata-Rata	940,664,762,166.66	1,127,150,336,982.20	83,45%	Cukup efisien

Sumber: Hasil Olah data penulis

Persentase tingkat rasio efisiensi belanja terkecil terdapat pada tahun 2021 65,65% sedangkan persentase tingkat rasio efisiensi belanja terbesar terdapat pada tahun 2018 91,47%. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, dengan rata-rata rasio efisiensi belanja yaitu 83.45%.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio efisiensi belanja.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, rata-rata derajat desentralisasinya yaitu 7,58% berada pada kemampuan keuangan yang sangat rendah yang berarti bahwa proporsi PAD masih relatif kecil dari total penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pemerintah daerah kabupaten Enrekang termasuk belum mampu menyelenggarakan desentralisasi karena nilai rata-rata yang masih dalam kategori sangat rendah (0%-25%).

Hasil analisis ini sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Putri & Munandar (2021) yang menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah Kota Malang termasuk kategori rendah.

2. Rasio ketergantungan,

Berdasarkan rata-rata tingkat rasio ketergantungan kabupaten enrekang yaitu 89,61% termasuk dalam kategori tinggi atau ketergantungan (>75 %-100%). Artinya kabupaten Enrekang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, hal ini karena kontribusi pendapatan asli daerah masih rendah dibandingkan pendapatan transfer.

Hasil analisis ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Harahap (2020) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah

daerah kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli tengah termasuk kategori yang sangat tinggi dengan tingkat persentase 95,03%. Artinya pemerintah pusat dan provinsi masih sangat dominan dalam membantu keuangan pemerintah daerah.

3. Rasio Kemandirian

Untuk rasio kemandirian, apabila dilihat dari tahun 2018-2022 rata-ratanya yaitu 8,46%, termasuk dalam kategori sangat rendah (0%-25%) dengan pola hubungan Instruktif. Artinya, tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten Enrekang masih sangat rendah dan belum mandiri karena peran pemerintah pusat masih lebih dominan.

Hasil analisis ini sama dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Sijabat et al. (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kota Malang termasuk kategori yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat masih jauh lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

4. Rasio Keserasian

Apabila dilihat dari tahun 2018-2022 rata-rata rasio belanja operasi yaitu 74,30%, sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 25,69%. Porsi belanja pemerintah daerah kabupaten enrekang masih cukup tinggi sedangkan porsi belanja modal termasuk kategori rendah, artinya pemerintah daerah lebih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi sedangkan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Hasil analisis pada rasio keserasian ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Rahmayati (2016), bahwa hasil perhitungan rasio keserasian pemerintah kabupaten sukoharjo diketahui sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten sukoharjo lebih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Apabila dilihat dari tahun 2018-2022, dengan rata-rata rasio efisiensi belanja yaitu 83,45% termasuk kriteria cukup efisien (80%-90%) artinya efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten enrekang termasuk cukup efisien.

Hasil analisis ini sama dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Putri & Munandar (2021) yang menemukan bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah kota Malang tahun anggaran 2016-2020 termasuk kategori cukup efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang tahun 2018-2022 dinilai cukup efektif, Walaupun berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk kategori sangat rendah. Itu artinya pemerintah daerah kabupaten Enrekang belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan belum mampu menjalankan proses desentralisasi. Berdasarkan rasio ketergantungan, berada pada tingkat ketergantungan yang tinggi. Keuangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan rasio kemandirian, berada pada tingkat kemandirian yang sangat rendah. Pemerintah kabupaten Enrekang belum mampu membiayai kebutuhan dan kegiatan daerahnya sendiri karena peran pemerintah pusat berdasarkan rasio keserasian yaitu belanja operasi, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 74,30% dan untuk rasio belanja modal keuangan daerah masih cukup kecil sehingga dapat dikatakan pemerintah kabupaten Enrekang masih kurang memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana umum. Berdasarkan rasio efisiensi belanja berada pada kategori cukup efisien.

B. Saran

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Enrekang maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Enrekang harus terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten Enrekang dapat meminimalisirkan anggaran belanja operasinya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk belanja pembangunan agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperpanjang periode waktu penelitian dan menggunakan lebih banyak rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang, sehingga hasil yang diberikan lebih akurat dan lebih baik.

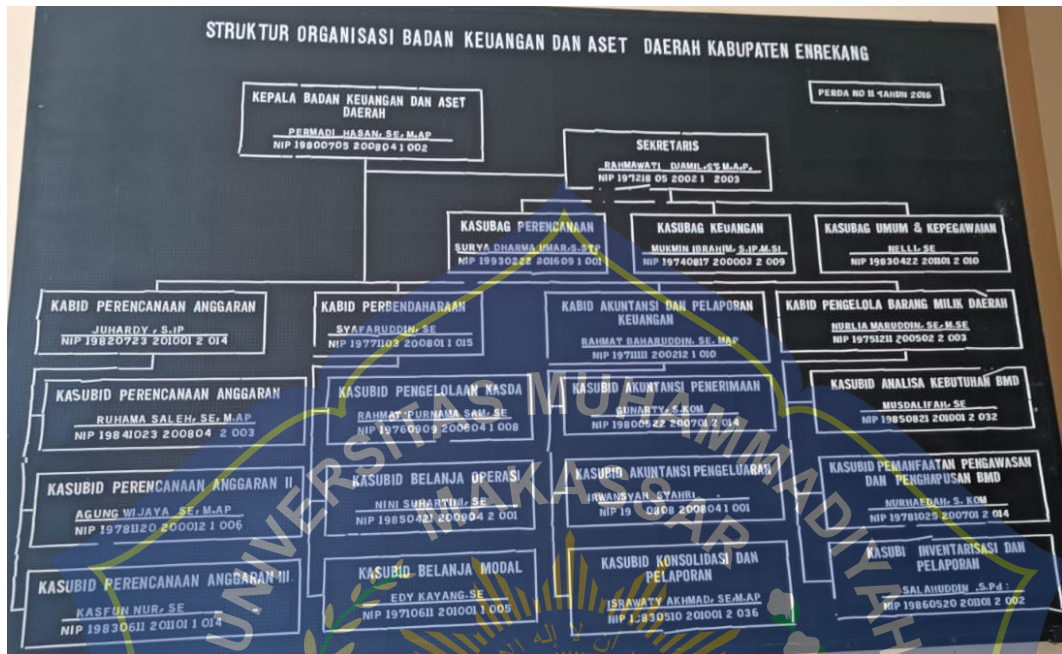
DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Sari, P., & Imam Hidayat, Ma. (N.D.). *Analisis Laporan Keuangan Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125. <https://doi.org/10.32477/Jrabi.V1i1.327>
- Dwi, E. M., & Safitri, T. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Among Makarti*, 16(1). <https://doi.org/10.52353/Ama.V16i1.394>
- Harahap, F. H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis*, 4(1), 34–38.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V4i1.87>
- Listiawati, & Kurniasari, E. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Bank Buku 4. *Ema*, 5(2), 77–87.
- Makodompit, S. P., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Emba*, 2(2), 1521–1527.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jsma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/Jsma.V14i1.84>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V13i2.90>
- Oktavia, M., Fakultas, R., Dan Bisnis, E., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 738(2), 738–747.
- Putra, M. W., Darwis, D., & Priandika, A. T. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: Cv Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.33365/Jimasia.V1i1.889>
- Putri, E. S. R., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jimea*, 5(3), 2296–2313.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Eka Cida*, 1(1), 40–54.

- Rahmayati, A., Ekonomi, F., Islam, B., Surakarta, I., Pandawa, J., & Kartasura, S. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran. *Jurnal Eka Cida*, 1(1), 40.
- Rizal, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pt Garuda Indonesia Tbk. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Sandy Mokodompit, P., Pangemanan, S. S., Elim, I., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, J. (1521). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Analisis Kinerja Keuangan... Jurnal Emba*, 2(2), 1521–1527.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana. *Bisma*, 4(2), 136–145.
- Sijabat, Y. M., Saleh, C., & Wachid, A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 236–242.
- Siregar, D. O. A., & Mariana, I. (2020). *Analisis Kinerja Kuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemeritahan Kota Depok-Jawa Barat)*. 9(1), 1–19.
- Supit, T. S. F., Areros, W. A., & Tampi, J. R. E. (N.D.). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Astra International, Tbk.*
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi*, 7(1), 81–92.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>
- Yulinchton, R. M., Ariani, N. B. M., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur*, 11(2), 303–314.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*.
- Zuhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/ltrev.v5i2.213>



Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Permohonan Izin Penelitian

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

——————

Nomor : 476/05/A.2-II/III-44/2023 Makassar, 1 april 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LPJM Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : MUH JASRI
Stambuk : 105731107419
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

DEKAN FAK. EKONOMI DAN BISNIS
NDM 651/507

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian PTSP



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)865580 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1142/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

10 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

01 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 476/05/A.2.II/IV/44/2023 tanggal 1 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH JASRI

No. Stambuk : 10573 1107419

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 April 2024 s/d 5 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

04-23

Lampiran 4. Izin Penelitian PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **14616/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Enrekang
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makasar Nomor : 1142/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 01 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH JASRI**
Nomor Pokok : **105731107419**
Program Studi : **Akuntansi**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 April s/d 10 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makasar di Makassar.
2. Peringgal

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/227/DPMP/ENR/IP/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MUH JASRI

Nomor Induk Mahasiswa : 105731107419
Program Studi : AKUNTANSI
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA
Alamat Peneliti : DESA MALUA KEC. MALUA
Lokasi Penelitian : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut :

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-04-10 s/d 2023-05-10

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl semua peraturan-perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
17/04/2023 08:46:23
KEPALA DINAS,


Dr. Ir. CHAIDAR BUHLI, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.2
NIP.19750528 200212 1 005

QR Code: 

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangwal Kota, Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat Tempat meneliti
4. Mahasiswa yts.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
B K A D
Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pinang
E N R E K A N G

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 900/80/BKAD/V/2023

Berdasarkan surat keterangan penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 73.16/227/DPMP/TS/ENR/IP/TV/2023 Tanggal 17 April 2023, maka dengan ini Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang dengan ini menyatakan:

Nama : MUH. JASRI
NIM : 105731107419
Jurusan : Akuntansi
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Desa Malua Kec. Malua Kab. Enrekang

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi terhitung mulai tanggal 10 April 2023 s/d 10 Mei 2023 dengan judul 'ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG'.

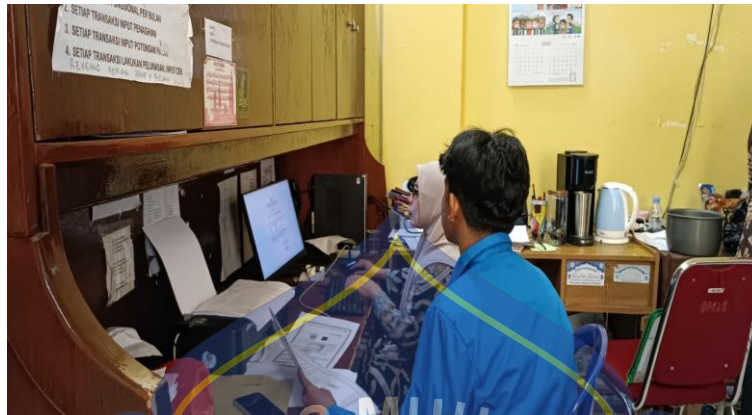
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 4 Mei 2023

a.n. KEPALA BKAD
KASUBAG KEUANGAN


MUKMIN, S.IP.M.Si.
NIP.19740817 200003 2 009

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Proses Pengumpulan Data Penelitian



Pengenalan serta wawancara singkat bersama Kepala Bagian Keuangan
BPKAD Kabupaten Enrekang

RIWAYAT HIDUP



Muh. Jasri Lahir di Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Pada tanggal 17 September 2001. Anak Ke-4 Dari 5 bersaudara merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Jihad dengan Ibunda Muhani. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di MI (Madrasah Ibtidayyah) Muhammadiyah Malua pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat Sekolah Dasar, Penulis melanjutkan pendidikan sekolahnya di SMP Negeri 2 Anggeraja dan tamat pada tahun 2016. Kemudian setelah tamat disekolah menengah pertama, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Enrekang dan tamat pada tahun 2019. Setelah tamat pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil jurusan akuntansi.

Selama menjalani status sebagai seorang mahasiswa, penulis aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu, Massampe (Mahasiswa Massenrempulu Fakultas Ekonomi) yakni sebuah organisasi yang berfungsi mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Enrekang. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan KKP (Kuliah Kerja Profesi) di Kantor Bupati Kabupaten Gowa pada Bagian Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa.